

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BENGKULU

Nurhasanah dan Maria

Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: fatihfauziakbar@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to know the influence of Regional Revenue Effectiveness ratio (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Share Allocation Fund (DBH) simultaneously and partially on the level of Regional Financial Independence. Population and samples in this research are regency and city in the province of Bengkulu that published APBD reports and realization of APBD for the year 2010-2013 in www.djpk.depkeu.go.id site. The analysis technique used was descriptive statistical analysis, classic assumption test, multiple linear regression and hypothesis testing. The result show of PAD, DAK, DAU, DBH simultaneously has positive and significant impact on the level of regional financial independence. In partial the effectiveness ratio of PAD, DAU and DBH has no influence and no significant impact on the level of regional financial independence. DAK has negative influence and significant impact on the level of regional financial independence.

Keywords: Regional Revenue Effectiveness Ratio, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Share Allocation Fund, Regional Financial Independence.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan dan parsial terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu yang mempublikasikan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi APBD selama tahun 2010-2013 dalam situs www.djpk.depkeu.go.id. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD, DAK, DAU, DBH secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial rasio efektivitas DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alakosi Khusus, Dana Bagi Hasil, Kemandirian Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan "selfsupporting" di bidang keuangan. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk

dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Halim (2007) kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam APBD.

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya secara efektif otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Undang-undang di bidang otonomi daerah telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab kepada daerah. Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya.

Pada saat ini, fenomena umum dalam bidang keuangan daerah yang dihadapi oleh sebagian besar pemda di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur APBD. Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, maka pemerintah kabupaten/pemerintah kota tersebut dapat dikatakan semakin mandiri. PAD merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektifitas, kemampuan daerah semakin baik (Halim: 2007).

Provinsi Bengkulu merupakan daerah termiskin di wilayah Sumatera dan berada pada urutan keenam

Tanah Air (<http://detiksumsel.com/provinsi-bengkulu-daerah-termiskin-di-sumatera>). Namun jika dilihat dari keberadaannya, provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang potensial dalam kekayaan sumber daya alam seperti batu bara, pasir besi, serta emas dan mineral pengikutnya. Selain itu kekayaan sumber daya alam yang paling potensial pada provinsi Bengkulu yaitu potensi perikanan. Potensi perikanan meliputi usaha perikanan darat, tambak, dan perikanan laut namun potensi perikanan sampai sekarang belum dimanfaatkan secara optimal dan masih berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam hal pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (<http://bkpmd.bengkuluprov.go.id>). Apabila provinsi Bengkulu dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal, maka akan menarik minat investor untuk berinvestasi dan dapat menambah PAD di provinsi Bengkulu.

Berdasarkan data dari www.djpk.depkeu.go.id, fenomena mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di provinsi Bengkulu adalah tingginya ketergantungan pemerintahan Kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu terhadap pemerintahan pusat. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pemerintah pusat. Fenomena ini dapat dilihat dari perbandingan PAD dan transfer pemerintah pusat sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Perbandingan PAD dan Transfer dari Pemerintah Pusat
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota	PAD	Transfer dari Pemerintah Pusat
2010	Kabupaten Bengkulu Selatan	11.894	341.656
	Kabupaten Bengkulu Tengah	3.137	273.886
	Kabupaten Bengkulu Utara	20.354	404.610
	Kabupaten Kaur	6.046	283.264
	Kabupaten Kepahiang	9.640	290.608
	Kabupaten Lebong	17.895	279.513
	Kabupaten Mukomuko	9.035	283.264
	Kabupaten Seluma	5.850	317.247
	Kota Bengkulu	26.678	407.308
2011	Kabupaten Bengkulu Selatan	14.758	382.926
	Kabupaten Bengkulu Tengah	3.867	338.580
	Kabupaten Bengkulu Utara	19.099	468.711
	Kabupaten Kaur	6.811	309.868
	Kabupaten Kepahiang	11.990	323.114
	Kabupaten Lebong	7.790	305.887
	Kabupaten Mukomuko	9.341	346.177
	Kabupaten Seluma	5.536	349.901
	Kota Bengkulu	39.318	456.091
2012	Kabupaten Bengkulu Selatan	18.911	464.457
	Kabupaten Bengkulu Tengah	5.743	357.937
	Kabupaten Bengkulu Utara	24.694	539.952
	Kabupaten Kaur	7.782	367.406

	Kabupaten Kepahiang	13.896	372.285
	Kabupaten Lebong	7.749	381.046
	Kabupaten Mukomuko	9.218	409.946
	Kabupaten Seluma	10.721	427.980
	Kota Bengkulu	41.710	546.755
2013	Kabupaten Bengkulu Selatan	25.454	512.273
	Kabupaten Bengkulu Tengah	8.757	424.597
	Kabupaten Bengkulu Utara	30.114	575.282
	Kabupaten Kaur	10.339	411.348
	Kabupaten Kepahiang	19.468	427.971
	Kabupaten Lebong	12.829	410.865
	Kabupaten Mukomuko	20.184	495.654
	Kabupaten Seluma	16.757	481.536
	Kota Bengkulu	55.980	613.982

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan uraian dan data pada tabel 1, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara secara simultan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013?
2. Apakah ada pengaruh rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara secara parsial terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah), maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara secara simultan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara secara parsial terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2013.

TELAAH LITERATUR

Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah:

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:23), yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah:

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Halim (2007:25), menegaskan ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari: “Keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).” Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD.

Pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Disamping memiliki unsur-unsur pokok, keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD.

Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemda adalah dengan melakukan analisis

rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan urusan pemerintah pusat yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah

Pengertian APBD

APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang memuat tentang rencana penerimaan, rencana pengeluaran serta rencana pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Menurut Saragih (2003:122), APBD adalah: “Dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun”.

Menurut Halim (2007: 20), definisi APBD adalah:

Suatu anggaran daerah, dimana memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, (2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang akan dilaksanakan, (3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. (4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun.

Menurut Halim dan Nasir (2006:44), APBD adalah “Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:20), APBD dapat didefinisikan sebagai:

Rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemda. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin

kecil ketergantungan pemda terhadap bantuan pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2009:132), PAD adalah “Penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendaptan Daerah yang Sah”.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak. PAD terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Rasio Efektivitas PAD

Pengertian Rasio

Menurut Riyanto (200:329), rasio adalah: “Alat yang dinyatakan dalam *arithmetical terms* yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial”. Menurut Harahap (2008:297), rasio adalah: “Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”.

Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004:134), efektivitas adalah: “Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”. Jones dan Pendlebury dalam Halim (2004), menyatakan bahwa efektivitas ialah: “Suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam menggapai tujuan.

Pengertian Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2007: 129), rasio efektivitas PAD adalah: “Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dianggarkan)”. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik karena semua rencana benar-benar terlaksana dan hal itu berarti bahwa kinerjanya terbukti.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Halim (2014:131), DAU adalah:

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk

membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum mempunyai bagian-bagian, yaitu:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Saragih (2003:104) “bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan”. Selanjutnya menurut Saragih (2003:132), “tujuan DAU disamping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan atau *equalization* kemampuan keuangan pemerintah daerah”.

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah-daerah yang kaya. Dengan kata lain, tujuan penting DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia” (Kuncoro, 2004:30).

Menurut Mardiasmo (2007:157), tujuan DAK terutama adalah:

Untuk *horizontal equity* dan *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAK adalah: “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan dana dalam APBN. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat

diperkirakan secara umum dengan rumus atau komitmen atau prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:108), DBH adalah: “Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah.

DBH merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemda menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemda harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan DBH terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:25), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari:

Keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Halim (2007:232) adalah “dengan rasio kemandirian (otonomi fiskal)”. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

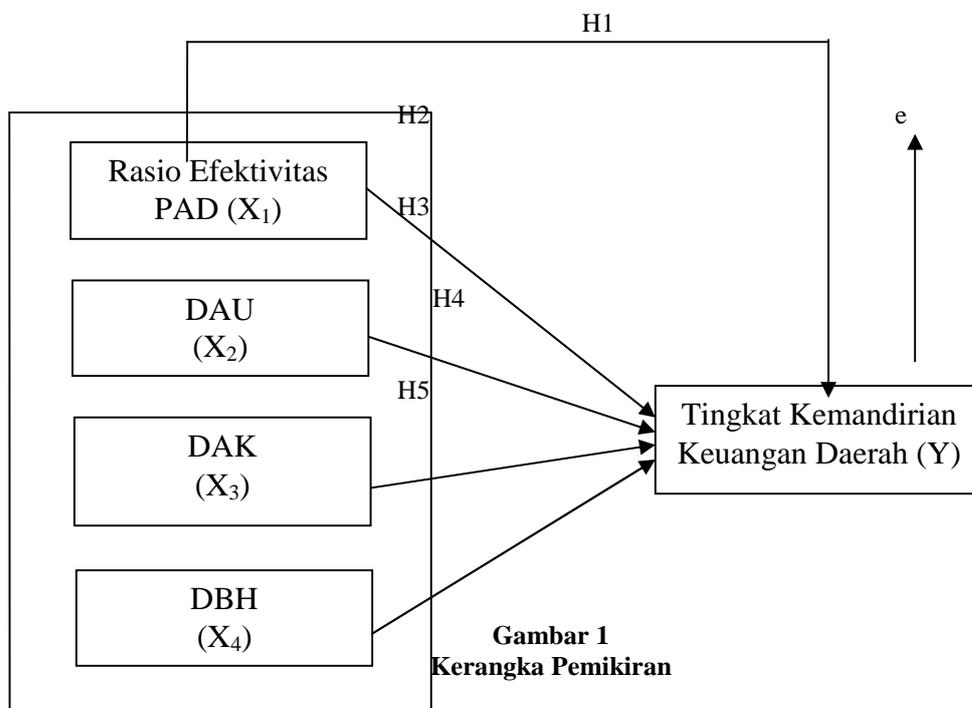
“Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah” (Mahmudi, 2007: 128).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. “Semakin tinggi masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi” (Halim, 2007: 233).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sekaran dalam Sugiyono, 2009: 88). Gambar 1 adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Berdasarkan gambar 1, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Rasio Efektivitas PAD (X_1), DAU (X_2), DAK (X_3) serta DBH (X_4) mempengaruhi variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) baik secara simultan maupun secara parsial.

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1 = Rasio efektivitas PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.

H2 = Rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.

H3 = DAU berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada

pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.

H4 = DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.

H5 = DBH berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif asosiatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13). Metode asosiatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Populasi dan Sampel Populasi

Menurut Sugiyono (2013: 115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi pada penelitian ini adalah laporan APBD dan laporan realisasi APBD dari 9 kabupaten dan 1 kota yang ada di provinsi Bengkulu tahun 2010-2013. Populasi penelitian dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Daftar Populasi Penelitian

No.	Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu
1.	Kabupaten Bengkulu Selatan
2.	Kabupaten Bengkulu Tengah
3.	Kabupaten Bengkulu Utara
4.	Kabupaten Kaur
5.	Kabupaten Kepahiang
6.	Kabupaten Lebong
7.	Kabupaten Mukomuko
8.	Kabupaten Rejang Lebong
9.	Kabupaten Seluma
10.	Kota Bengkulu

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Sampel

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling* dengan teknik *Sampling Purposive*. Menurut Sugiyono (2013:123), “*Sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Berikut kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel pada penelitian ini:

1. Kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu yang mempublikasikan laporan APBD dan laporan

realisasi APBD dalam situs Departemen Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id).

2. Kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu yang mempublikasikan laporan APBD dan laporan realisasi APBD selama tahun 2010-2013.

Berdasarkan kriteria tersebut, dari 10 kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu yang memenuhi kriteria sebagai sampel sebanyak 9 kabupaten dan kota sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 tabel 4.

Tabel 3
Pemilihan Sampel Berdasarkan Karakteristik yang Ditetapkan

No.	Karakteristik	Jumlah
1.	Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang mempublikasikan laporan APBD dan laporan realisasi APBD dalam situs Departemen Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangannya.	10
2.	Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang mempublikasikan laporan APBD dan laporan realisasi APBD selama tahun 2010-2013.	(1)
Total Sampel		9

Berdasarkan tabel 3, sampel yang digunakan pada penelitian ini, 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2013, sehingga data yang digunakan sebanyak 36 laporan APBD dan laporan realisasi APBD (tabel 4).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah:

1. Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu tahun 2010-2013 yang dipublikasikan, yang didownload melalui website www.djpk.depkeu.go.id.
2. Penelitian terdahulu serta berbagai literatur karya ilmiah dan buku-buku referensi yang menyangkut teori-teori terkait serta relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (media elektronik) melalui situs www.djpk.kemenkeu.go.id.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dimaksud berupa angka-angka yang dapat dihitung serta dapat dianalisis secara sistematis yang terdapat dalam laporan APBD dan laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu tahun 2010-2013. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data sekunder dengan *horizon waktu: time series* dan *cross section*.

Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

Identifikasi Variabel
Variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono (2013: 59). Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan ialah rasio efektivitas PAD, DAU, DAK, serta DBH.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menjelaskan konsep masing-masing variabel dalam penelitian sebagaimana diungkapkan pada telaah literatur. Selanjutnya, operasionalisasi variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 4
Daftar Sampel Penelitian

No.	Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu	Jumlah Tahun
1.	Kabupaten Bengkulu Selatan	4
2.	Kabupaten Bengkulu Tengah	4
3.	Kabupaten Bengkulu Utara	4
4.	Kabupaten Kaur	4
5.	Kabupaten Kepahiang	4
6.	Kabupaten Lebong	4
7.	Kabupaten Mukomuko	4
8.	Kabupaten Seluma	4
9.	Kota Bengkulu	4
Total Sampel		36

Sumber: Data diolah dari www.djpk.depkeu.go.id

Tabel 5
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel dalam Formula	Skala Pengukuran
Independen		
Rasio Efektivitas PAD	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio
Dana Alokasi Umum	$\frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Alokasi Khusus	$\frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Bagi Hasil	$\frac{\text{Realisasi DBH}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dependen		
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio

Model dan Teknik Analisis

Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + b_4 \cdot X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

a = Nilai Konstanta

b_1, \dots, b_4 = Nilai Koefisien Regresi

X_1 = Rasio Efektivitas PAD
 X_2 = DAU
 X_3 = DAK
 X_4 = DBH
 e = Faktor lain yang tidak diteliti
 Selanjutnya teknik analisis data menggunakan *software SPSS* Versi 20.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Secara administratif Pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi menjadi sembilan kabupaten dan satu kota, secara rinci ditampilkan pada tabel 6.

Tabel 6
Luas Area Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu

No.	Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu	Luas Area (Km ²)	Ibukota Kabupaten
1.	Kab Bengkulu Selatan	1,186.10	Manna
2.	Kab Bengkulu Tengah	1.123,94	Karang Tinggi
3.	Kab Bengkulu Utara	4,424.60	Argamakmur
4.	Kab Kaur	2,369.05	Bintuhan
5.	Kab Kepahiang	665,00	Kepahiang
6.	Kab Lebong	1,929.00	Tubei
7.	Kab Mukomuko	4.036,70	Mukomuko
8.	Kab Rejang Lebong	1,639.98	Curup
9.	Kab Seluma	2.400,400	Pasar Tais
10.	Kota Bengkulu	144.52	Bengkulu
Jumlah (Total)		19,919.33	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu (2013)

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan data secara numerik yang meliputi nilai minimum, maksimum,

rata-rata dan nilai simpangan baku dari variabel penelitian. Tabel 7 menunjukkan *output* uji statistik deskriptif pada penelitian ini.

Tabel 7
Output Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Efektivitas PAD	36	35,03	196,42	91,9475	35,42560
DAU	36	56,80	77,62	68,6631	4,38808
DAK	36	4,47	15,00	8,9025	2,39761
DBH	36	3,57	10,66	6,2906	1,41183
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	36	1,04	7,64	3,2156	1,65194
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Hasil olahan SPSS Versi 20.0.

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa jumlah data sebanyak 36, dengan penjelasan mengenai masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel rasio efektivitas PAD memiliki nilai minimum sebesar 35,03%, nilai maksimum sebesar 196,42%, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 91,9475% dan nilai simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 35,42%.
2. Variabel DAU memiliki nilai minimum sebesar 56,80%, nilai maksimum sebesar 77,62%, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 68,6631% dan nilai simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 4,38808%.
3. Variabel DAK memiliki nilai minimum sebesar 4,47%, nilai maksimum sebesar 15,00%, nilai

rata-rata (*mean*) sebesar 8,9025% dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 2,39761%.

4. Variabel DBH memiliki nilai minimum sebesar 3,57%, nilai maksimum sebesar 10,66%, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 6,2906% dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 1,41183%.
5. Variabel tingkat kemandirian keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 1,04%, nilai maksimum sebesar 7,64% nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,2156% dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 1,65194%.

Uji Regresi Linear Berganda

Tujuan uji regresi linear berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel

dependen dan variabel independen serta memprediksi nilai variabel independen dengan nilai dependen.

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Output Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,518	3,581		1,820	,078
Rasio Efektivitas PAD (X ₁)	,007	,007	,146	,957	,346
¹ DAU (X ₂)	,017	,048	,044	,349	,729
DAK (X ₃)	-,500	,092	-,725	-5,422	,000
DBH (X ₄)	-,099	,177	-,085	-,561	,579

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil olahan SPSS Versi 20.0

Berdasarkan tabel 8, nilai konstanta untuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini yaitu 6,518 dengan koefisien regresinya 0,007 untuk variabel X₁ sedangkan untuk variabel X₂ memiliki koefisien regresi bernilai 0,017, kemudian untuk variabel X₃ memiliki koefisien -0,500 dan untuk koefisien regresi untuk variabel X₄ dengan koefisien regresi -0,099. Jadi, dapat dibuat persamaan regresi bergandanya sebagai berikut:

$$Y = 6,518 + 0,007X_1 + 0,017X_2 - 0,500X_3 - 0,099X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa:

1. Dengan nilai konstanta sebesar 6,518, artinya apabila rasio efektivitas PAD, DAU, DAK dan X₄ DBH bernilai 0, maka tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 6,518.
2. Koefisien regresi rasio efektivitas PAD bernilai 0,007. Artinya jika rasio efektivitas PAD naik 1%

maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,007.

3. Koefisien regresi DAU bernilai 0,017. Artinya jika DAU turun sebesar 1% maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,017.
4. Koefisien regresi untuk DAK bernilai -0,500. Artinya jika DAK naik sebesar 1% maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,500.
5. Koefisien regresi untuk DBH bernilai -0,099. Artinya jika DBH naik sebesar 1% maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,099.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

R² digunakan untuk mengetahui besaran nilai korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 9 merupakan *output* R²

Tabel 9
Output Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,733 ^a	,538	,478	1,19322	1,876

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, Rasio Efektivitas PAD

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil olahan SPSS Versi 20.0, 2016

Berdasarkan tabel 9 bahwa R² sebesar 0,538 (53,8%), artinya variabel independen X₁ (rasio efektivitas PAD), X₂ (DAK), X₃ (DAU) dan X₄ (DBH) secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen (Y) tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 53,8%, sisanya sebesar 46,2%

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskannya variabel dependen. Pada penelitian

ini jenis uji F yang digunakan ialah ANOVA karena metode ini dapat digunakan untuk menguji satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Berdasarkan nilai F dan tingkat

signifikan, diketahui ada atau tidaknya pengaruh antara rasio efektivitas PAD, DAK, DAU dan DBH terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil uji F dengan SPSS dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10
Output Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	51,375	4	12,844	9,021	,000 ^b
Residual	44,137	31	1,424		
Total	95,512	35			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, Rasio Efektivitas PAD

Sumber: Hasil olahan SPSS Versi 20.0.

Berdasarkan tabel 10, nilai F_{hitung} sebesar 9,021 dengan probabilitas (sig.) 0,000 dengan F_{tabel} sebesar 2,68. Hal ini menunjukkan bahwa F_{hitung} memiliki nilai yang lebih besar dari F_{tabel} ($9,021 \geq 2,68$). Selain itu, F_{hitung} yang bernilai positif menunjukkan bahwa pengaruh rasio efektivitas PAD, DAK, DAU dan DBH berbanding lurus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah atau dengan kata lain semakin tinggi rasio efektivitas PAD dan semakin rendah DAK, DAU dan DBH maka semakin

tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat signifikan rasio efektivitas PAD, DAK, DAU, DBH terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kurang dari 5% ($0,000 \leq 0,05$). Berdasarkan $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ yaitu $9,021 \geq 2,68$ atau $Sig. F \leq$ yaitu $0,000 \leq 0,05$ maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima yang artinya rasio efektivitas PAD, DAK, DAU, DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil *output* uji t dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11
Output Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,518	3,581		1,820	,078		
Rasio Efektivitas PAD	,007	,007	,146	,957	,346	,637	1,569
DAU	,017	,048	,044	,349	,729	,932	1,073
DAK	-,500	,092	-,725	-5,422	,000	,833	1,200
DBH	-,099	,177	-,085	-,561	,579	,654	1,530

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil olahan SPSS Versi 20.0, 2016

Berdasarkan tabel 10, maka pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas PAD memiliki nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($0,957 \leq 2,039$). Hasil ini menunjukkan rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat signifikan rasio efektivitas PAD terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah lebih dari 5%

($0,346 \geq 0,05$), maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, yang artinya rasio efektivitas PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. DAU memiliki nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($0,349 \leq 2,039$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat signifikan DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

- lebih dari 5% ($0,729 \geq 0,05$), maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak, yang artinya DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. DAK memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,422 \geq 2,039$). Nilai negatif pada t_{hitung} menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya, jika DAK mengalami peningkatan maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan ataupun sebaliknya. Tingkat signifikan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kurang dari 5% ($0,000 \leq 0,05$), maka H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima. Dengan demikian, DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
 4. DBH memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,561 < 2,039$). Hasil ini menunjukkan DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat signifikan DBH terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah lebih dari 5% ($0,579 \geq 0,05$), maka H_{05} diterima dan H_{a5} ditolak, artinya DBH secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pembahasan

Hipotesis Pertama

H_1 = Rasio efektivitas PAD, DAK, DAU serta DBH secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan alat bantu SPSS versi 20.0 bahwa variabel independen yaitu rasio efektivitas PAD, DAK, DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dari nilai F_{hitung} yang memiliki nilai lebih besar dari F_{tabel} ($9,02 \geq 2,68$) dengan Sig. F kurang dari 5% ($0,000 \leq 0,05$). Nilai F_{hitung} yang bernilai positif menunjukkan bahwa pengaruh rasio efektivitas PAD, DAK, DAU dan DBH berbanding lurus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah atau dengan kata lain semakin tinggi rasio efektivitas PAD dan semakin rendah DAK, DAU dan DBH maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah yang dihasilkan dan sebaliknya. Selain itu, berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,538 atau 53,8%, artinya kombinasi variabel independen (X_1 atau rasio efektivitas PAD, X_2 atau DAK, X_3 atau DAU dan X_4 atau DBH mampu menjelaskan variabel dependen (Y) tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 53,8%, sisanya sebesar 46,2% ($100\% - 53,8\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Siagian (2014) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD, DAK, DAU dan DBH secara

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Hipotesis Kedua

H_2 = Rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
Rasio efektivitas PAD memiliki $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($0,957 < 2,039$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat signifikan rasio efektivitas PAD terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah lebih dari 5% ($0,346 \geq 0,050$). Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat. PAD merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur PAD sudah kuat, dapat dinyatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat juga.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Muliana (2009) dan Siagian (2014) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

3. Hipotesis Ketiga

H_3 = DAU berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

DAU memiliki nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($0,349 \leq 2,039$). Artinya, DAU tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat signifikan DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah lebih dari 5% ($0,729 \geq 0,05$). Semakin tinggi DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah, sebaliknya jika DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah semakin rendah maka tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi. Pada penelitian ini, meskipun DAU yang diterima cukup besar dibandingkan dengan DAK dan DBH tetapi DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan besarnya DAU yang diterima kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu diperoleh berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan. DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan dalam negeri. 10% DAU daerah provinsi, 90% untuk DAU daerah kabupaten/kota. DAU provinsi diperoleh dari jumlah DAU seluruh provinsi dikali bobot daerah provinsi yang bersangkutan dibagi dengan bobot seluruh daerah provinsi. Untuk DAU kabupaten atau kota diperoleh dari jumlah DAU seluruh kabupaten atau kota dikali

bobot daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dibagi dengan bobot seluruh daerah kabupaten atau kota.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Marizka (2013) yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, namun berbeda dengan hasil penelitian Muliana (2009) dan Siagian (2014) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

4. Hipotesis Keempat

H4= DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

DAK memiliki nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($-5,422 < 2,039$). Tingkat signifikan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kurang dari 5% ($0,000 \leq 0,05$). Nilai negatif t_{hitung} menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika DAK mengalami peningkatan maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan dan sebaliknya. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus, merupakan bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah guna mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Muliana (2009), Marizka (2013) dan Siagian (2014) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

5. Hipotesis Kelima

H5= DBH berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

DBH memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,561 < 2,039$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat signifikan DBH terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah lebih dari 5% ($0,579 \geq 0,05$). Semakin tinggi DBH yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah tersebut dan sebaliknya. Jika pemda menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemda harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan DBH terhadap pendapatan daerah dapat meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Marizka (2013) yang menyimpulkan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, namun berbeda dengan hasil penelitian Siagian (2014) yang menyimpulkan bahwa DBH

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Secara Simultan, rasio efektivitas PAD, DAK, DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, semakin rendah DAK, DAU, dan DBH maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah yang dihasilkan ataupun sebaliknya. Pengaruh tersebut sebesar 53,8%, dan sisanya 46,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
2. Secara Parsial, rasio efektivitas PAD, DAU dan DBH tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah jumlah kabupaten dan kota yang diteliti, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih representatif dengan lokasi penelitian yang berbeda. Hal ini agar dapat dijadikan bahan perbandingan antara hasil penelitian ini dengan penelitian selanjutnya dengan variasi variabel yang berbeda.
2. Bagi Pemerintah daerah, agar menggunakan PAD, DAU, DAK dan DBH secara efektif dan efisien serta pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal, sehingga dapat menambah PAD di kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Bengkulu Dalam Angka 2013*, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Nasir, Jamal Abdul. 2006. Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Manajemen Usahawan*. Nomor 06 Th XXXV Juni 2006. Jakarta: Lembaga Management FE-UI.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Marizka, Reza. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2011*. Skripsi. Padang: Universitas Padang.
- Muliana. 2009. *Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. Undang-Undang. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- _____. Undang-Undang. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sartika. 2014. *Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2008-2012*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syarifin dan Jubaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Bani Quraisy.
- <http://bkpmd.bengkuluprov.go.id/ver3/index.php/8umum/9Okeunggulanbengkulu>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 08.00 WIB.
- <http://detiksumsel.com/provinsi-bengkulu-daerah-termiskin-di-sumatera>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 08.30 WIB.
- www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada 30 Desember 2015 pukul 09.00 WIB.
- <http://junaidichaniago.wordpress.com>. Diakses pada 2 Januari 2016 pukul 14.00 WIB.